

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO.6 TAHUN 2023**

TESIS

Oleh:

MARTHA YOSEPHINE PURBA

2102190087



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO.6 TAHUN 2023**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

MARTHA YOSEPHINE PURBA

2102190087



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martha Yosephine Purba
NIM : 2102190087
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Undang-Undang No.6 Tahun 2023”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Juni 2024



(Martha Yosephine Purba)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Ditinjau dari Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Oleh :

Nama : Martha Yosephine Purba

NIM : 2102190087

Program Studi : Magister Hukum

Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada program studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 Juni 2024,

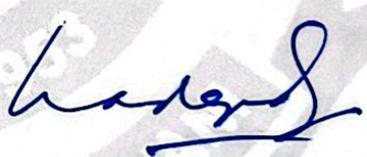
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

NIDN: 0327046303


Dr. Binoto Nadapdap S.H., M.H

NIDN: 0330106505

Ketua Program Studi Magister Hukum

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Putinda Saragi S.H., M.H.,
NIDN: 0305097105


Dr. dr. Bernadetha Nadeak M.Pd., PA
NIDN/NIDK : 0320116402



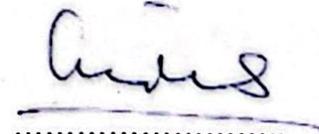
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 25 Juni 2024 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Martha Yosephine Purba
NIM : 2102190087
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau dari Undang-Undang No.6 Tahun 2023” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum	Sebagai Ketua	
2. Dr. Binoto Nadapdap S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Dr. Gindo E.L. Tobing S.H, M.H,	Sebagai Anggota	

Jakarta, 25 Juni, 2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martha Yosephine Purba

NIM : 2102190087

Fakultas : Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Undang-Undang No.6 Tahun 2023**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 25 Juni 2024



Martha Yosephine Purba

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan tesis ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
2. Bapak Dr. Binoto Nadapdap S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
3. Bapak Prof.Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku rektor Universitas Kristen Indonesia dimana penulis mengemban dan mengembangkan ilmu pengetahuannya.

4. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku kepala program studi pascasarjana hukum Universitas Kristen Indonesia atas arahan dan bimbingannya kepada penulis.
5. Prof. Dr. dr.Bernadetha Nadeak M.Pd.,PA., selaku direktur program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh jajaran staf dan pengajar Universitas Kristen Indonesia program studi pascasarjana Hukum yang telah meluangkan waktunya membagikan ilmu dan pengetahuannya.
7. Suami tercinta, Pdt. Yason Resyiworo Hyangputra S.E., S.Th., atas kepercayaan, doa dan sebagai teman bertukar pikiran penulis, juga anak terkasih Maria Clara Estelo, atas doa dan semangat yang tak pernah putus.
8. Orangtua Bapak Revolt Juner Purba S.E., dan Ibu Lorenta Elisa Siagian, Bapak mertua Pdt. Asworo Pireno dan Ibu dr. Esther M Siregar, kakak Yetty Imleda Wati Purba dan adik Saras Septriana Purba yang selalu memberikan kepercayaan kepada penulis sebagai *support system* yang tak kenal lelah mendukung dan mendoakan.
9. Rekan-rekan program pascasarjana ilmu hukum, mengenal kalian adalah kesempatan baik yang Tuhan anugerahkan.
10. Rekan-rekan di perusahaan dimana penulis bekerja, yang dengan tulus memberikan kesempatan dan waktu untuk penulis menyelesaikan tugas belajar.

11. Sahabat Marina Wijaya, Retno Haryati, Mahdy Hidayat, Ronald Silitonga, Bernard Sagala, Ariesta Hapsari yang telah memberikan keceriaan dalam proses penulisan tesis ini.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan doa kepada penulis selama penulis melaksanakan studi di Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jakarta, 2 Mei 2024

Penulis,

Martha Yosephine Purba

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	11
C. Manfaat dan Tujuan penelitian.....	11
1. Manfaat Penelitian	11
a. Secara teoritis.....	11
b. Secara praktis	12
2. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1. Kerangka Teori.....	12
a. Teori Tujuan Hukum	12
b. Teori Perlindungan Hukum	17
2. Kerangka Konsep.....	18
a. Perlindungan Hukum	18
b. Perjanjian Kerja	19
c. Hubungan Kerja	20

d. Pekerja	20
e. Pengusaha	21
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pengumpulan data.....	23
3. Analisa Data.....	24
4. Pendekatan penelitian	24
5. Kekhususan Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Teori Tujuan Hukum	27
1. Pengertian	27
2. Tujuan Hukum	27
a. Keadilan	27
b. Kemanfaatan	30
c. Kepastian Hukum.....	31
B. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum.....	37
1. Pengertian	35
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	36
3. Sarana Perlindungan Hukum	36
C. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja	40
1. Pengertian Perjanjian Kerja	40
a. Berdasarkan KUH Perdata	40
b. Berdasarkan UUK.....	41
c. Dalam UU Cipta Kerja 2020 dan UU Cipta Kerja 2023	44
d. Menurut Subekti	45
e. Menurut Imam Soepomo	45
2. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja	46

3. Hubungan Kerja	48
4. Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....	49
5. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja	58
BAB III PERBEDAAN PENGATURAN PERJANJIAN KERJA WAKTU	
TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI UU CIPTA KERJA 2023 DAN UUK.....	70
A. Pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja 2023	70
B. Perbedaan pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam UUK dengan UU Cipta Kerja 2023	78
1. Tujuan.....	78
2. Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	84
3. Kompensasi Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	97
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT.XXX DITINJAU DARI UU CIPTA KERJA 2023	
106	
A. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam PKWT di PT XXX ditinjau dari UU Cipta Kerja 2023 dianalisa berdasarkan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	106
1. Profil Perusahaan dan Proses Bisnis di PT. XXX.....	106
2. Proses Rekrutment Pekerja PKWT	108
B. Perlindungan Hukum Pekerja terhadap PKWT di PT. XXX berdasarkan UU Cipta Kerja 2023	113
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah merupakan salah satu ketentuan yang mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau selanjutnya disebut UU Cipta Kerja 2023. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja 2023 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau selanjutnya disebut UUK dan bagaimana perlindungannya dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data yang digunakan adalah data sekunder data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan tersier.

Hasil penelitian ini adalah Pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja 2023 terdapat aturan yang belum jelas dengan diberlakukan terburu-buru memberikan ketidakpastian hukum terhadap pekerja/buruh. Sebagaimana teori tujuan hukum Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum haruslah terdiri dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Adanya kebebasan dalam menentukan jangka waktu dalam perjanjian untuk pekerjaan tertentu dapat membuat pekerja dalam status PKWT dipekerjakan secara terus menerus tanpa adanya kepastian pekerjaan tetap. Ketidakjelasan konsekuensi PKWT menjadi PKWTT, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja yang selalu ada pada posisi tawar yang rendah, walaupun terdapat aturan kompensasi kepada pekerja hal tersebut tidak serta-merta memberikan manfaat bagi pekerja itu sendiri, karena pengaturan kompensasi yang belum jelas. Dalam prakteknya masih ada masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya menjalankan aturan perundang-undangan tersebut. Negara harusnya melindungi segenap warga negaranya termasuk pada posisi pekerja, bukan hanya mementingkan keadilan bagi pengusaha saja namun juga harus melindungi pekerja dengan berbagai instrumen hukum yang ada.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WORKERS IN THE FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENT (PKWT) RELATED TO LAW NO. 6 OF 2023

The fixed-term employment agreement (PKWT) is one of the provisions that have changed after the entry into force of the Law No. 6 of 2023 On the Establishment of Government Regulations Replacing the Act No. 2 of 2023, on the Creation of Employment into the Law or later called the Labour Creation Act 2023.

The purpose of this research is to find out the differences between the regulation of the PKWT in the Labour Creation Act 2023 and the Employment Act No. 13/2003 or later called UUK and how to protect it by using the theory of legal purpose Gustav Radbruch and the theories of legal protection Philipus M Hadjon.

Method of research used is normative, that is, legal research that puts the law as a building system of norms. The data used are secondary data obtained from the results of a library survey or a survey of various literature or library material relating to a problem or research material consisting of primary legal material, secondary law material, tertiary material.

Result of this study is the PKWT Regulation in the Labour Creation Act 2023 there are unclear rules by imposing hastily giving legal uncertainty to workers/workers. As Gustav Radbruch's theory of the purpose of law that the goal of law must consist of certainty, justice and utility. The absence of freedom in determining the period of time in the contract for a particular job can make a worker in the status of a PKWT employed continuously without the presence of a fixed job certainty. The uncertainty of the consequences of a PKWT becoming a PKWTT, can cause injustice to the worker who is always in a low bidding position, even though there are rules compensation to workers such as does not immediately benefit the employee himself, because the arrangement of compensation is unclear. In practice, there are companies still that have not fully implemented the rules of these law. The state should protect all its citizens, including the workers, not only with regard to justice for the entrepreneur but also to protect the workers with the various legal instruments available.

Keywords: fixed-term employment agreement (PKWT), regulation, legal protection